Mapaccing:
Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Volume 01, Issue. 02, Oktober 2026, Page 60 - 72
eISSN : 1234- 5678 DOI : 10.123456/Mapaccing.
Website: https://ejournals-glm.id/index.php/mapaccing

PERKEMBANGAN TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL DI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2024–2025

[1] Dheavivi Ayu Dian Pebrian
[1] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
email: dheaviviayudian@uho.ac.id

Abstract
Digital payments and online lending have expanded rapidly in Indonesia, yet provincial evidence outside Java remains scarce. This study describes the development of digital financial transactions in Southeast Sulawesi Province during 2024–2025, covering Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) payments, peer-to-peer lending, and the digitalization of banking and local government transactions; owing to limited provincial mobile-banking data, the banking dimension is represented by regional-bank QRIS and local government electronic transactions. Secondary data from Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and Statistics Indonesia were analysed descriptively using year-on-year growth and transaction intensity ratios. QRIS users rose from 214,257 in February 2024 to about 303 thousand in December 2025, while annual user growth slowed from 28.5 to about 12 percent. Merchants grew 37.65 percent, fourth-quarter transaction volume grew 184.61 percent, and fourth-quarter transactions per user (fourth-quarter volume divided by December users) rose from 5.6 to 14.4. Online lending grew 98.36 percent year on year as of May 2025 with a 1.59 percent 90-day default rate. The findings show a shift from adding users to deepening use and support stronger financial literacy and consumer protection policies.

Keyword: *digital financial transactions, financial inclusion, peer-to-peer lending, QRIS, Southeast Sulawesi*

Abstrak
Pembayaran digital dan pinjaman daring berkembang pesat di Indonesia, tetapi bukti empiris tingkat provinsi di luar Jawa masih terbatas. Penelitian ini mendeskripsikan perkembangan transaksi keuangan digital di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024–2025, mencakup pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pinjaman daring, serta digitalisasi layanan perbankan dan transaksi pemerintah daerah; karena data perbankan seluler per provinsi terbatas, dimensi perbankan diwakili oleh QRIS bank daerah dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Data sekunder dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan tingkat pertumbuhan tahunan dan rasio intensitas transaksi. Pengguna QRIS naik dari 214.257 orang pada Februari 2024 menjadi sekitar 303 ribu orang pada Desember 2025, sementara pertumbuhan tahunannya melambat dari 28,5 persen menjadi sekitar 12 persen. Merchant tumbuh 37,65 persen, volume transaksi triwulan IV tumbuh 184,61 persen, dan transaksi per pengguna pada triwulan IV (volume triwulan IV dibagi jumlah pengguna posisi Desember) naik dari 5,6 menjadi 14,4. Pinjaman daring tumbuh 98,36 persen per Mei 2025 dengan tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) 1,59 persen. Temuan ini menunjukkan pergeseran dari perluasan pengguna ke pendalaman penggunaan dan mendukung penguatan kebijakan literasi keuangan serta perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *inklusi keuangan, pinjaman daring, QRIS, Sulawesi Tenggara, transaksi keuangan digital*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran, menyimpan dana, dan memperoleh pembiayaan. Di Indonesia, perubahan ini didorong oleh penerapan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia, perkembangan layanan perbankan digital, dan pertumbuhan pinjaman daring. Secara nasional, jumlah pengguna QRIS mencapai 59,53 juta pada triwulan IV 2025, naik dari 55,43 juta pada triwulan IV 2024 (GoodStats, 2026). Outstanding pembiayaan pinjaman daring juga meningkat dari Rp77,02 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp94,85 triliun pada November 2025 (Bisnis.com, 2025a; Investortrust, 2026).

Pertumbuhan tersebut tidak tersebar merata antarwilayah. Sekitar 40,83 juta pengguna QRIS nasional berada di Pulau Jawa, sedangkan wilayah lain mencatat jumlah yang jauh lebih kecil (GoodStats, 2026). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa cepat digitalisasi keuangan menjangkau provinsi di luar Jawa yang berkarakter kepulauan, memiliki sebaran penduduk yang luas, dan bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, serta pertambangan seperti Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara, sekitar 303 ribu pengguna QRIS pada akhir 2025 setara dengan sekitar 10,7 persen dari 2.836.740 penduduk provinsi menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (Tribunnews Sultra, 2026). Rasio kasar ini sekitar separuh rasio nasional, yaitu 59,53 juta pengguna dari 284,4 juta penduduk atau sekitar 20,9 persen (Ayuningtyas, 2025; GoodStats, 2026).

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang aktif dalam program digitalisasi daerah. Bank Indonesia mencatat 17 pemerintah daerah di provinsi ini telah berstatus pemda digital pada semester I 2024 (Antara Sultra, 2024), dan provinsi ini termasuk 14 provinsi yang telah dapat menggunakan fitur QRIS Tap (Fortune IDN, 2025). Pada sisi pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan pendanaan pinjaman daring tertinggi sekaligus tingkat kredit macet terendah pada 2025 (Bisnis.com, 2025b).

Meskipun demikian, kajian akademik mengenai transaksi keuangan digital di tingkat provinsi masih terbatas. Penelitian sejenis lebih banyak dilakukan di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan (Syamsuddin, 2026), sedangkan data Sulawesi Tenggara tersebar dalam rilis Bank Indonesia, OJK, dan pemberitaan. Di tingkat antarprovinsi dan nasional, Tanjung et al. (2022) menemukan dengan data panel 34 provinsi bahwa nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Nabila et al. (2022) serta Sidiq dan Wuryaningtyas (2024) menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data Sulawesi Tenggara belum dihimpun dan dianalisis secara sistematis, terutama untuk periode terbaru 2024–2025 ketika penggunaan QRIS di daerah ini telah meluas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu bagaimana perkembangan pembayaran digital berbasis QRIS di Sulawesi Tenggara periode 2024–2025, bagaimana perkembangan pembiayaan digital melalui pinjaman daring dibandingkan dengan nasional, serta bagaimana perkembangan digitalisasi layanan perbankan dan transaksi pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan ketiga aspek tersebut secara kuantitatif. Hasilnya diharapkan menambah bukti empiris mengenai inklusi keuangan digital di luar Jawa serta menjadi masukan bagi Bank Indonesia, OJK, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan pemerintah daerah.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Keuangan Digital dan Inklusi Keuangan

Keuangan digital mencakup layanan keuangan yang diberikan melalui telepon seluler, internet, atau kartu yang terhubung dengan sistem pembayaran digital (Ozili, 2018). Gomber et al. (2017) menjelaskan bahwa keuangan digital meliputi pembayaran nontunai, uang elektronik, perbankan seluler, hingga pembiayaan berbasis platform. Inovasi ini mengubah hubungan antara penyedia jasa keuangan dan pengguna karena layanan tidak lagi bergantung pada kantor fisik.

Inklusi keuangan dipahami sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh anggota masyarakat (Sarma, 2008). Ozili (2018) menyatakan bahwa keuangan digital dapat memperluas akses bagi kelompok berpenghasilan rendah karena biaya layanannya lebih murah. Data Global Findex menunjukkan bahwa pembayaran digital sering menjadi pintu masuk pertama masyarakat ke dalam sistem keuangan formal (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Di Indonesia, OJK mengukur inklusi keuangan dari parameter penggunaan produk dan layanan keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 80,51 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kesenjangan antara akses dan pemahaman ini menjadi latar penting dalam membaca perkembangan transaksi keuangan digital di daerah.

Teori Biaya Transaksi dan Eksternalitas Jaringan

Teori biaya transaksi berangkat dari gagasan Coase (1937) bahwa setiap pertukaran ekonomi menimbulkan biaya untuk mencari informasi, bernegosiasi, dan menegakkan kesepakatan. Williamson (1985) mengembangkan gagasan ini dengan menyatakan bahwa pelaku ekonomi memilih mekanisme pertukaran yang meminimalkan biaya tersebut. Dalam konteks pembayaran, pilihan antara tunai dan nontunai dapat dipahami sebagai pilihan atas mekanisme dengan biaya transaksi terendah.

Pembayaran digital menurunkan biaya transaksi melalui penghapusan kebutuhan uang kembalian, berkurangnya risiko uang palsu, dan hilangnya biaya perjalanan ke kantor bank. Bagi pedagang kecil, QRIS juga menghasilkan catatan transaksi yang dapat menjadi dasar riwayat keuangan untuk mengakses pembiayaan. Penurunan biaya ini mendorong pengguna yang telah mencoba pembayaran digital untuk menggunakannya lebih sering dalam transaksi sehari-hari.

Sistem pembayaran juga memiliki sifat eksternalitas jaringan, yaitu nilai suatu layanan meningkat ketika jumlah penggunanya bertambah (Katz & Shapiro, 1985). Semakin banyak merchant yang menerima QRIS, semakin besar manfaat bagi konsumen, dan sebaliknya semakin banyak konsumen yang memakai QRIS, semakin besar insentif bagi pedagang untuk menerimanya. Karena itu, pertumbuhan jumlah merchant merupakan indikator penting di samping jumlah pengguna.

Teori Difusi Inovasi dan Penerimaan Teknologi

Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi inovasi dalam masyarakat mengikuti kurva berbentuk S. Pada tahap awal adopsi berlangsung lambat, kemudian melonjak setelah

mencapai massa kritis, lalu melambat ketika sebagian besar calon pengguna telah mengadopsi. Kecepatan adopsi dipengaruhi oleh keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemudahan dicoba, dan keterlihatan hasil inovasi.

Technology Acceptance Model menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan menentukan niat seseorang untuk menggunakan teknologi (Davis, 1989). Venkatesh et al. (2003) memperluas model ini dengan menambahkan pengaruh sosial dan kondisi pendukung, seperti ketersediaan infrastruktur dan dukungan kelembagaan. Kedua faktor tambahan ini relevan untuk daerah yang adopsinya sangat dipengaruhi program sosialisasi pemerintah dan bank sentral.

Kombinasi teori difusi inovasi dan model penerimaan teknologi memberikan kerangka untuk membaca pola pertumbuhan pengguna dan intensitas transaksi digital. Perlambatan pertumbuhan pengguna dapat menandakan fase pematangan, bukan kemunduran adopsi. Pada fase tersebut, perhatian beralih dari jumlah pengguna baru ke frekuensi dan nilai transaksi per pengguna.

Literasi Keuangan dan Risiko Pembiayaan Digital

Literasi keuangan adalah kemampuan individu memahami konsep keuangan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan (Lusardi & Mitchell, 2014). Individu dengan literasi rendah cenderung mengambil keputusan utang yang kurang tepat, seperti meminjam dengan biaya tinggi atau melebihi kemampuan membayar. Oleh karena itu, perluasan akses kredit tanpa peningkatan literasi dapat menimbulkan risiko bagi rumah tangga.

Pinjaman daring menawarkan proses yang cepat dan persyaratan yang ringan dibandingkan kredit perbankan. Kemudahan ini memperluas akses pembiayaan, tetapi juga membuka peluang bagi penyedia tidak berizin yang menyasar masyarakat dengan pemahaman terbatas. Kualitas inklusi keuangan dengan demikian tidak cukup diukur dari jumlah pengguna, tetapi juga dari kemampuan pengguna mengelola risiko.

Hasil SNLIK 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi pinjaman daring nasional hanya 24,90 persen dengan indeks inklusi 4,40 persen (Investortrust, 2025a). Angka ini jauh di bawah sektor perbankan yang memiliki indeks literasi 65,50 persen dan indeks inklusi 70,65 persen. Kesenjangan tersebut menjadi dasar untuk menilai pertumbuhan pinjaman daring di Sulawesi Tenggara secara hati-hati.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir

Penelitian empiris-deskriptif di Sulawesi Selatan menggunakan data Laporan Perekonomian Provinsi Bank Indonesia untuk menggambarkan pertumbuhan QRIS, uang elektronik, dan Indeks Penjualan Riil (Syamsuddin, 2026). Penelitian tersebut menemukan bahwa ketiga indikator bergerak searah dalam dinamika perekonomian daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa data sekunder Bank Indonesia di tingkat provinsi layak digunakan untuk penelitian deskriptif.

Bukti empiris antarprovinsi juga menunjukkan peran ekonomi digital dalam perekonomian daerah. Tanjung et al. (2022) menggunakan data panel 34 provinsi periode 2018–2020 dan menemukan bahwa nilai transaksi e-commerce serta pertumbuhan usaha e-commerce berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara jumlah pengguna internet berpengaruh negatif. Nabila et al. (2022) menemukan bahwa ekonomi

digital yang diukur dengan nilai transaksi uang elektronik dan e-commerce memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan Sidiq dan Wuryaningtyas (2024) menunjukkan bahwa transaksi uang elektronik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dalam dua hal. Pertama, penelitian ini memasukkan dimensi pembiayaan digital melalui pinjaman daring, tidak hanya pembayaran. Kedua, penelitian ini mengambil lokasi Sulawesi Tenggara dengan data terbaru 2024–2025 yang belum banyak dikaji.

Kerangka pikir penelitian ini menempatkan perkembangan transaksi keuangan digital dalam tiga dimensi, yaitu pembayaran digital, pembiayaan digital, dan digitalisasi kelembagaan. Setiap dimensi dibaca dengan teori difusi inovasi, teori biaya transaksi dan eksternalitas jaringan, serta konsep literasi keuangan. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, tidak diajukan hipotesis statistik; analisis diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang menggambarkan perkembangan variabel tanpa menguji hubungan sebab-akibat. Lokasi penelitian adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan periode pengamatan Januari 2024 sampai Desember 2025, yang merupakan data terbaru yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan OJK. Unit analisis adalah agregat provinsi, dengan pembanding data nasional; data tahun 2023 hanya digunakan sebagai konteks awal (baseline) sebelum periode pengamatan.

Data yang digunakan adalah data sekunder bulanan, triwulanan, dan tahunan. Data pembayaran digital meliputi jumlah pengguna, jumlah merchant, volume, dan nominal transaksi QRIS yang dirilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tenggara; data pembiayaan digital meliputi pertumbuhan outstanding pinjaman daring, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90), dan jumlah pengaduan dari OJK; sedangkan data kelembagaan meliputi status pemda digital, transaksi QRIS bank daerah, dan indeks literasi serta inklusi keuangan dari OJK dan BPS. Data dikumpulkan melalui dokumentasi rilis resmi dan pemberitaan yang mengutip rilis tersebut. Setiap angka ditelusuri ke pernyataan resmi KPw BI Sulawesi Tenggara atau OJK yang dikutip dalam sumber; apabila angka yang sama diberitakan oleh lebih dari satu media, angka tersebut dibandingkan antar-media, dan angka nasional dicocokkan dengan siaran pers resmi OJK, BPS, atau Bank Indonesia. Angka yang tidak konsisten antar-rilis tidak dikoreksi, tetapi dilaporkan apa adanya disertai catatan.

Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis tren. Tingkat pertumbuhan tahunan (*year on year*, yoy) dihitung dengan rumus $G = (X_t - X_{t-1}) / X_{t-1} \times 100\%$, yang membandingkan suatu periode dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan intensitas penggunaan dihitung sebagai volume transaksi dibagi jumlah pengguna pada periode yang sama, yaitu volume triwulan IV dibagi jumlah pengguna posisi Desember. Angka yang dalam sumber disajikan dalam bentuk bulat atau perkiraan, seperti 173 ribu atau sekitar 303 ribu, digunakan sebagaimana dilaporkan; pertumbuhan yang dihitung dari angka tersebut diberi tanda ± dan dibulatkan, sedangkan apabila rilis telah mencantumkan persentase pertumbuhan, angka rilis yang digunakan. Hasil perhitungan

disajikan dalam tabel dan gambar, kemudian diinterpretasikan menggunakan teori difusi inovasi, teori biaya transaksi, dan konsep literasi keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perkembangan Pembayaran Digital Berbasis QRIS

Jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Tenggara bertambah sekitar 89 ribu orang selama periode pengamatan. Pengguna tercatat 214.257 orang pada Februari 2024 (Antara Sultra, 2025a), lalu meningkat menjadi 271.531 orang pada Desember 2024 (EmitenNews, 2025) dan sekitar 303 ribu orang pada Desember 2025 (Koran Jakarta, 2026). Secara keseluruhan, jumlah pengguna naik sekitar 41,4 persen dalam kurun kurang dari dua tahun.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Sulawesi Tenggara, Februari 2024–Desember 2025

Sumber: KPw Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, data diolah (2026)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah pengguna terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan tahunannya menurun. Pertumbuhan tahunan pengguna tercatat 28,5 persen pada Februari 2025, turun menjadi 20,31 persen pada April 2025, dan sekitar 12 persen pada Desember 2025 (Antara Sultra, 2025a, 2025c; Koran Jakarta, 2026). Penambahan pengguna baru pada awal 2025 hanya sekitar 2,3–2,4 ribu orang per bulan, lalu naik kembali menjadi 31,7 ribu orang selama triwulan IV 2025 (Merdeka.com, 2026).

Berbeda dengan pengguna, jumlah merchant, volume, dan nominal transaksi tumbuh jauh lebih cepat. Merchant QRIS naik 37,65 persen dari 173 ribu menjadi 239 ribu, sedangkan volume transaksi triwulan IV 2025 naik 184,61 persen menjadi 4,36 juta transaksi (Koran Jakarta, 2026). Rincian perkembangan indikator QRIS disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Indikator QRIS di Sulawesi Tenggara, 2024–2025

Indikator	Satuan	2024	2025	Pertumbuhan (yoy)
Pengguna, posisi Desember	ribu orang	271,5	±303,0[a]	±12%
Merchant, posisi April	ribu unit	147,5	203,7	38,08%
Merchant, posisi Desember	ribu unit	173,0[a]	239,0[a]	37,65%[b]
Volume transaksi Januari–Februari	ribu transaksi	567,8	1.380,0[a]	143,0%
Volume transaksi Januari–April	ribu transaksi	2.749,9	6.870,0[a]	149,84%[b]
Volume transaksi triwulan IV	ribu transaksi	1.530,0[a]	4.360,0[a]	184,61%[b]
Nominal transaksi Januari–Maret	Rp miliar	110,0[a]	321,1	183,62%[b]
Transaksi per pengguna, triwulan IV[c]	transaksi per pengguna	5,6	14,4	±155%

Sumber: KPw Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (Antara Sultra, 2025a, 2025b, 2025c; Koran Jakarta, 2026), data diolah (2026)

Catatan: [a] angka dibulatkan dalam rilis sumber; [b] persentase pertumbuhan sesuai rilis BI; [c] volume triwulan IV dibagi jumlah pengguna posisi Desember. Angka volume kumulatif dan triwulanan berasal dari rilis yang berbeda dan dapat memiliki basis pencatatan berbeda atau telah direvisi (lihat subbab Keterbatasan Data), sehingga perbandingan hanya dilakukan antarperiode dalam rilis yang sama.

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator transaksi tumbuh di atas 140 persen secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan pengguna. Akibatnya, intensitas penggunaan meningkat tajam dari 5,6 menjadi 14,4 transaksi per pengguna pada triwulan IV. Sebagai pembanding, volume transaksi sepanjang 2024 tercatat 12,58 juta, tumbuh 284,6 persen dari 2023 (EmitenNews, 2025).

Angka volume setahun 2024 tersebut berasal dari rilis Februari 2025, berbeda dengan rilis triwulan IV yang mencatat 1,53 juta transaksi pada triwulan IV 2024. Jika dibandingkan langsung, kedua angka menyiratkan rata-rata sekitar 3,68 juta transaksi per triwulan pada triwulan I–III 2024, jauh di atas triwulan IV. Pola ini lebih mungkin mencerminkan perbedaan basis pencatatan antar-rilis daripada penurunan transaksi pada akhir 2024, sehingga kedua angka tidak digabungkan dalam perhitungan pertumbuhan.

Perkembangan Pembiayaan Digital melalui Pinjaman Daring

Pembiayaan pinjaman daring di Sulawesi Tenggara tumbuh jauh lebih cepat daripada rata-rata nasional. Per Mei 2025, outstanding pendanaan di provinsi ini tumbuh 98,36 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan nasional pada periode yang sama sebesar 27,93 persen (Bisnis.com, 2025b; Kontan, 2025). Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Pinjaman Daring Sulawesi Tenggara dan Nasional, 2025

Wilayah	Periode	Pertumbuhan outstanding (yoy)	TWP90
Sulawesi Tenggara	April 2025	95,85%	1,59%
Sulawesi Tenggara	Mei 2025	98,36%	1,59%
Nasional	Mei 2025	27,93%	3,19%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Bisnis.com, 2025b, 2025c; Kontan, 2025), data diolah (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan pinjaman daring di Sulawesi Tenggara sekitar 3,5 kali laju nasional, dengan tingkat wanprestasi yang justru lebih rendah. Secara nasional, outstanding pinjaman daring naik dari Rp77,02 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp94,85 triliun pada November 2025 (Bisnis.com, 2025a; Investortrust, 2026). Sebagai titik acuan, outstanding pinjaman fintech di Sulawesi Tenggara tercatat Rp196 miliar pada Agustus 2023 (Penasultra, 2023a), sedangkan angka nominal 2024–2025 belum dipublikasikan secara terbuka.

Pertumbuhan pembiayaan digital juga diikuti risiko dari penyedia tidak berizin. OJK Sulawesi Tenggara menerima 97 pengaduan pinjaman daring ilegal selama Januari–Juni 2025 (IQPlus, 2025). OJK juga menyoroti kecenderungan masyarakat meminjam karena ikut-ikutan atau *fear of missing out*. Sebagai pembanding, secara nasional OJK menerima 7.096 pengaduan pinjaman daring ilegal pada periode yang sama (Investortrust, 2025b), sehingga Sulawesi Tenggara menyumbang sekitar 1,4 persen pengaduan nasional, sedikit di atas porsi penduduknya yang sekitar 1,0 persen. Data pengaduan tingkat provinsi untuk 2024 tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga perbandingan antarwaktu belum dapat dilakukan.

Digitalisasi Layanan Perbankan dan Transaksi Pemerintah Daerah

Digitalisasi transaksi keuangan di Sulawesi Tenggara juga didorong dari sisi kelembagaan. Sebanyak 17 pemerintah daerah telah berstatus pemda digital pada semester I 2024 (Antara Sultra, 2024). Kabupaten Konawe Kepulauan menempati peringkat pertama indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan kanal pembayaran pajak melalui QRIS, mobile banking Bank Sultra, dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024).

Sebagai konteks awal (baseline) sebelum periode pengamatan, layanan QRIS Bank Sultra disetujui Bank Indonesia pada September 2023 (Penasultra, 2023b), dan pada tahun yang sama program Pasar SIAP QRIS telah menjangkau sembilan pasar tradisional dengan lebih dari 950 pedagang (Antara, 2023). Sepanjang 2025, Bank Sultra mencatat 403.373 transaksi QRIS dengan 16.894 pengguna dan 649 merchant aktif (Telisik.id, 2026). Dengan dasar tersebut, bank daerah turut menjadi penyelenggara pembayaran digital selama periode pengamatan.

Data volume dan nilai transaksi mobile banking dan internet banking per provinsi belum dipublikasikan secara terbuka. Akibatnya, dimensi perbankan digital dalam penelitian ini lebih banyak digambarkan melalui QRIS bank daerah dan digitalisasi transaksi pemerintah. Data tersebut perlu dilengkapi dari Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara pada penelitian selanjutnya.

PEMBAHASAN

Pergeseran dari Perluasan ke Pendalaman Penggunaan

Pola perkembangan pengguna QRIS selama 2024–2025 sesuai dengan fase pematangan pada kurva difusi inovasi (Rogers, 2003). Pertumbuhan tahunan pengguna yang turun dari 28,5 persen menjadi sekitar 12 persen menandakan bahwa sebagian besar calon pengguna awal telah mengadopsi QRIS. Pada fase ini, pertumbuhan bergeser dari penambahan pengguna baru ke peningkatan frekuensi transaksi.

Kenaikan intensitas dari 5,6 menjadi 14,4 transaksi per pengguna per triwulan konsisten dengan teori biaya transaksi (Williamson, 1985). Setelah pengguna merasakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan QRIS, pembayaran digital menggantikan tunai untuk transaksi sehari-hari. Temuan ini juga sejalan dengan model penerimaan teknologi, yaitu persepsi kemanfaatan dan kemudahan mendorong penggunaan berulang (Davis, 1989).

Pertumbuhan merchant sekitar 38 persen per tahun, lebih cepat daripada pertumbuhan pengguna, memperkuat efek jaringan dalam ekosistem QRIS (Katz & Shapiro, 1985). Semakin banyak titik penerimaan membuat konsumen semakin terdorong untuk bertransaksi secara digital. Penambahan 31,7 ribu pengguna pada triwulan IV 2025 juga menunjukkan bahwa ruang penambahan pengguna baru belum sepenuhnya habis.

Ekspansi Pembiayaan Digital dan Tantangan Literasi

Pertumbuhan pinjaman daring di Sulawesi Tenggara perlu dibaca lebih hati-hati dibandingkan pembayaran digital. TWP90 sebesar 1,59 persen menunjukkan kualitas kredit yang masih baik dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Namun, pertumbuhan hampir 100 persen per tahun menunjukkan bahwa sebagian besar portofolio masih berusia muda sehingga risikonya belum sepenuhnya terlihat. Oleh karena itu, TWP90 Sulawesi Tenggara perlu dipantau dalam 6–12 bulan ke depan, ketika sebagian besar pinjaman baru tersebut memasuki masa jatuh tempo.

Indeks literasi pinjaman daring nasional yang hanya 24,90 persen menunjukkan bahwa akses yang meluas belum diimbangi pemahaman yang memadai (Investortrust, 2025a). Kondisi ini sejalan dengan temuan Lusardi dan Mitchell (2014) bahwa literasi keuangan yang rendah meningkatkan kemungkinan keputusan utang yang merugikan. Sebanyak 97 pengaduan pinjaman ilegal dalam satu semester di Sulawesi Tenggara memperkuat kekhawatiran tersebut.

Dengan demikian, digitalisasi keuangan di Sulawesi Tenggara pada 2024–2025 telah memperluas sekaligus memperdalam penggunaan layanan keuangan. Kualitas inklusi keuangan ke depan bergantung pada kemampuan pengguna memahami produk, biaya, dan risiko layanan digital. Penguatan literasi dan perlindungan konsumen menjadi syarat agar pertumbuhan transaksi digital memberi manfaat yang berkelanjutan.

Keterbatasan Data

Penelitian ini menghadapi keterbatasan dalam konsistensi data antar-rilis. Misalnya, volume transaksi QRIS Januari–Maret 2025 dilaporkan 2,09 juta, sedangkan volume Januari–April 2025 dilaporkan 6,87 juta (Antara Sultra, 2025b, 2025c). Perbedaan ini kemungkinan berasal dari basis pencatatan atau revisi data, sehingga analisis ini menggunakan perbandingan tahunan dari rilis yang sama.

Keterbatasan lain adalah belum tersedianya data nominal pinjaman daring dan data perbankan seluler per provinsi untuk 2024–2025. Indeks literasi dan inklusi keuangan yang digunakan dalam analisis utama masih berupa angka nasional dari SNLIK 2025. Hasil SNLIK 2026 yang untuk pertama kalinya menyajikan angka provinsi tidak dijadikan pembanding utama karena pendataannya dilakukan pada 26 Januari–18 Februari 2026, di luar periode pengamatan, dan cakupan pengukurannya diperluas sehingga tidak sebanding langsung dengan SNLIK 2025 (Otoritas Jasa Keuangan et al., 2026). Sebagai konteks, OJK Sulawesi

Tenggara melaporkan indeks inklusi keuangan provinsi pada 2026 sebesar 85,52 persen, naik dari 83 persen (Antara, 2026).

Meskipun demikian, data yang tersedia telah cukup untuk menggambarkan arah dan besaran perubahan transaksi keuangan digital di Sulawesi Tenggara. Konsistensi temuan pada berbagai indikator, yaitu pengguna, merchant, volume, nominal, dan pembiayaan, memperkuat kesimpulan penelitian. Konfirmasi angka melalui Laporan Perekonomian Provinsi tetap dianjurkan untuk penggunaan kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi keuangan digital di Sulawesi Tenggara berkembang pesat selama 2024–2025. Jumlah pengguna QRIS bertambah sekitar 41 persen, tetapi pertumbuhan tahunannya melambat, sedangkan merchant, volume, dan nominal transaksi tumbuh jauh lebih cepat. Pola ini menunjukkan bahwa adopsi QRIS telah memasuki fase pematangan, yaitu pertumbuhan bergeser dari perluasan pengguna ke pendalaman penggunaan.

Pada sisi pembiayaan, pinjaman daring di Sulawesi Tenggara tumbuh hampir dua kali lipat dalam setahun dengan tingkat kredit macet yang masih rendah. Pertumbuhan tersebut disertai pengaduan pinjaman ilegal dan berlangsung di tengah literasi pinjaman daring yang rendah. Digitalisasi kelembagaan melalui pemda digital dan QRIS bank daerah turut memperkuat ekosistem, meskipun data perbankan seluler per provinsi belum tersedia secara terbuka.

SARAN

Perlambatan pertumbuhan pengguna di tingkat provinsi dan rasio penetrasi yang baru sekitar 10,7 persen mengindikasikan bahwa perluasan QRIS perlu menjangkau kelompok dan wilayah yang belum terlayani. Bank Indonesia dan TP2DD dapat mempertimbangkan perluasan akseptasi QRIS ke wilayah di luar pusat kota, termasuk kabupaten kepulauan, dengan terlebih dahulu memetakan sebaran pengguna dan merchant per kabupaten/kota. OJK Sulawesi Tenggara perlu memprioritaskan edukasi pinjaman daring, pemantauan TWP90, dan pengawasan pinjaman ilegal, sedangkan pemerintah daerah perlu memperluas elektronifikasi pajak dan retribusi agar transaksi pemerintah ikut mendorong ekosistem pembayaran digital.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data tingkat kabupaten/kota, data nominal pinjaman daring per provinsi, dan indeks SNLIK 2026 tingkat provinsi. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan data primer pengguna dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi keuangan digital serta dampaknya terhadap pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2023, 15 September). *BI Sultra luncurkan Pojok QRIS*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/3729168/bi-sultra-luncurkan-pojok-qris

Antara. (2026, 24 Oktober). *Perluas akses keuangan masyarakat, OJK Sultra gelar BIK 2026* [Video]. ANTARA News. https://www.antaranews.com/video/5809787/perluas-akses-keuangan-masyarakat-ojk-sultra-gelar-bik-2026

Antara Sultra. (2024, 5 September). *BI sebut 17 daerah di Sultra terapkan program pemda digital*. ANTARA News Sulawesi Tenggara. https://sultra.antaranews.com/berita/468635/bi-sebut-17-daerah-di-sultra-terapkan-program-pemda-digital

Antara Sultra. (2025a, 25 Maret). *Pengguna QRIS di Sultra capai 275 ribu pengguna*. ANTARA News Sulawesi Tenggara. https://sultra.antaranews.com/berita/501945/pengguna-qris-di-sultra-capai-275-ribu-pengguna

Antara Sultra. (2025b, 2 Mei). *BI catat pengguna QRIS di Sultra capai 278 ribu orang hingga Maret 2025*. ANTARA News Sulawesi Tenggara. https://sultra.antaranews.com/berita/505677/bi-catat-pengguna-qris-di-sultra-capai-278-ribu-orang-hingga-maret-2025

Antara Sultra. (2025c, 28 Mei). *BI: Pengguna QRIS per April 2025 di Sultra capai 280.446*. ANTARA News Sulawesi Tenggara. https://sultra.antaranews.com/berita/508065/bi-pengguna-qris-per-april-2025-di-sultra-capai-280446

Ayuningtyas, A. D. (2025, 6 Mei). *Jakarta diproyeksikan alami pertumbuhan penduduk 0,23% pada 2025*. https://goodstats.id/article/jakarta-diproyeksikan-alami-pertumbuhan-penduduk-0-23-pada-2025-yGbM2

Bisnis.com. (2025a, 12 Februari). *OJK: 10 dari 97 fintech P2P lending belum penuhi modal minimum Rp7,5 miliar*. https://finansial.bisnis.com/read/20250212/563/1838940/ojk-10-dari-97-fintech-p2p-lending-belum-penuhi-modal-minimum-rp75-miliar

Bisnis.com. (2025b, 21 Juli). *Warga tertib bayar, ini 3 provinsi dengan kredit macet (TWP90) pinjol terendah*. https://finansial.bisnis.com/read/20250721/563/1894968/warga-tertib-bayar-ini-3-provinsi-dengan-kredit-macet-twp90-pinjol-terendah

Bisnis.com. (2025c, 7 Juni). *Utang pinjol warga Maluku Utara melonjak 146,63%, kredit macet aman?* https://finansial.bisnis.com/read/20250607/563/1883062/utang-pinjol-warga-maluku-utara-melonjak-14663-kredit-macet-aman

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2024, 23 Agustus). *Terbaik dalam penerapan ETPD se-Sultra* [Catatan berita]. https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/11/13.44-Terbaik-dalam-Penerapan-ETPD-se-Sultra.pdf

Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. *Economica, 4*(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4

EmitenNews. (2025, 20 Februari). *Pengguna QRIS di Sultra terus meningkat, capai 12.579.611 transaksi*. https://emitennews.com/news/pengguna-qris-di-sultra-terus-meningkat-capai-12579611-transaksi

Fortune IDN. (2025, 19 November). *Transaksi QRIS Tap capai Rp13,8 miliar, didominasi sektor transportasi*. https://www.fortuneidn.com/finance/transaksi-qris-tap-capai-rp13-8-miliar-didominasi-sektor-transportasi-00-ccw2k-bvtsn7

Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics, 87*(5), 537–580. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x

GoodStats. (2026, 8 Februari). *Jumlah pengguna QRIS tembus 59 juta pada Q4 2025*. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-pengguna-qris-tembus-59-juta-pada-q4-2025-2ym79

Investortrust. (2025a, 2 Mei). *Hasil SNLIK 2025: Indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang sektor perbankan*. https://investortrust.id/financial/64851/hasil-snlik-2025-indeks-literasi-dan-inklusi-keuangan-masih-ditopang-sektor-perbankan

Investortrust. (2025b, 3 Agustus). *OJK waspadai pinjol ilegal lintas negara, 7.096 aduan masuk selama semester I 2025*. https://investortrust.id/financial/74576/ojk-waspadai-pinjol-ilegal-lintas-negara-7096-aduan-masuk-selama-semester-i-2025

Investortrust. (2026, 9 Januari). *OJK catat outstanding pindar tumbuh 25,45% jadi Rp94,85 triliun per November 2025*. https://investortrust.id/financial/90895/ojk-catat-outstanding-pindar-tumbuh-25-45-jadi-rp-94-85-triliun-per-november-2025

IQPlus. (2025, 6 Agustus). *OJK soroti maraknya pinjol ilegal di Sultra karena tren FOMO*. BCA Sekuritas. https://bcasekuritas.co.id/latest-news/news/ojk-soroti-maraknya-pinjol-ilegal-di-sultra-karena-tren-fomo

Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network externalities, competition, and compatibility. *American Economic Review, 75*(3), 424–440.

Kontan. (2025, 16 Juli). *Maluku Utara jadi provinsi dengan kredit macet terendah di industri fintech lending*. https://keuangan.kontan.co.id/news/maluku-utara-jadi-provinsi-dengan-kredit-macet-terendah-di-industri-fintech-lending

Koran Jakarta. (2026, 13 Februari). *QRIS lagi ngebut! Transaksi di Sultra melejit 184 persen akhir 2025*. https://koran-jakarta.com/2026-02-13/qris-lagi-ngebut-transaksi-di-sultra-melejit-184-persen-akhir-2025

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Merdeka.com. (2026, 14 Februari). *BI catat lonjakan transaksi QRIS Sulawesi Tenggara 184 persen di triwulan IV 2025: Dorong ekonomi digital*. https://www.merdeka.com/uang/read/8081190/bi-catat-lonjakan-transaksi-qris-sulawesi-tenggara-184-persen-di-triwulan-iv-2025-dorong-ekonomi-digital

Nabila, H. N., Chaidir, T., & Suprapti, I. A. P. (2022). Analisis pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017–2021. *Jurnal Konstanta, 1*(2), 50–63. https://doi.org/10.29303/konstanta.v1i2.362

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 2 Mei). *Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat: OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025* [Siaran pers bersama]. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Keuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, & Badan Pusat Statistik. (2026, 11 Agustus). *Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat: OJK, LPS, dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026* [Siaran pers bersama]. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hasil-SNLIK-Tahun-2026.aspx

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on financial inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review, 18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Penasultra. (2023a, November). *OJK imbau masyarakat bijak dalam berutang lewat aplikasi pinjol*. https://penasultra.id/ojk-imbau-masyarakat-bijak-dalam-berutang-lewat-aplikasi-pinjol

Penasultra. (2023b, Oktober). *Layanan QRIS Bank Sultra kini diluncurkan*. https://penasultra.id/layanan-qris-bank-sultra-kini-diluncurkan

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Sarma, M. (2008). *Index of financial inclusion* (Working Paper No. 215). Indian Council for Research on International Economic Relations.

Sidiq, S., & Wuryaningtyas, J. H. (2024). Analysis of the effect of electronic money transactions and macroeconomic variables on economic growth in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 3*(2), 163–173. https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art6

Syamsuddin, F. R. (2026). Dampak pertumbuhan transaksi QRIS dan uang elektronik terhadap Indeks Penjualan Riil di Sulawesi Selatan: Bukti empiris-deskriptif triwulanan dari laporan Bank Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI), 10*(1), 779–786. https://doi.org/10.52643/marsi.v10i1.8493

Tanjung, A. A., Syafii, M., Tarigan, S. B., & Harahap, W. G. (2022). Analisis pengaruh ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Model data panel. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 4*(2), 567–575. https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/2223

Telisik.id. (2026, 16 Februari). *Bank Sultra catat 403 ribu transaksi QRIS 2025, ekosistem pembayaran digital menguat*. https://telisik.id/news/bank-sultra-catat-403-ribu-transaksi-qris-2025-ekosistem-pembayaran-digital-menguat

Tribunnews Sultra. (2026, 29 Juli). *Penduduk Sulawesi Tenggara 2026: Pria lebih 35.550 dari wanita, Kendari terpadat, Konut terjarang*. https://sultra.tribunnews.com/sultra/90673/penduduk-sulawesi-tenggara-2026-pria-lebih-35550-dari-wanita-kendari-terpadat-konut-terjarang

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.